

*Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 Fraksi DPRD Demak Soroti Silpa Rp 242,258 miliar



VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR) - Rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yang disampaikan Bupati Demak dr Hj Eisti'annah pada 31 Mei 2022 ditindaklanjuti dengan penyampaian pandangan umum tujuh fraksi DPRD, Senin (6/6). Ketujuh fraksi semuanya menyoroti sisa lebih pembiayaan APBD (Silpa) tahun 2021 yang tertulis sebesar Rp 242,258 miliar.

Seperti disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Demak H Busro, keberhasilan penda mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI

terhadap LKPj APBD 2021 merupakan kebanggaan. Bahkan sekaligus menjadi semangat bekerja lebih baik lagi tahun-tahun mendatang, seiring diraihnya penghargaan tersebut hingga enam kali berurutan sejak 2016.

"Namun ada sejumlah catatan yang perlu dijelaskan saudara bupati, salah satunya mengenai Silpa 2021 sebesar Rp 242,258 miliar," ujarnya.

Senada disampaikan Isa Anshori, juru bicara Fraksi PKB. Dikatakan, meski ada penurunan nominal Rp 2,270 miliar dibandingkan Silpa tahun anggaran 2020 sebesar Rp 245,029 miliar, namun jumlah Rp 242,258 miliar itu disebut cukup signifikan. Sehingga OPD disebut kurang cermat, teliti dan profesional dalam menyusun anggaran.

"Hal itu ditandai adanya beberapa pekerjaan tidak terealisasi. Di samping kelebihan bayar pekerjaan yang kurang volume hingga sebesar Rp 1,333 miliar," imbuhnya.

Pendapat sama diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra H Mu'ti Cholil. Menurutnya, serapan APBD kurang optimal terlihat dari silpa yang masih cukup tinggi. "Pelaksanaan APBD bagian dari proses demokrasi. Maka itu harus bermuara pada rakyat sebagai mandataris," kata dia.



Bupati dr Hj Eisti'annah saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Demak terhadap LKPj APBD 2021 pada Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet.

Kritik serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Hj Hermin Widayati. Menurutnya, belanja tak terduga Rp 4,569 miliar yang tidak terserap karena sudah dianggarkan di OPD terkait pengamanan covid-19 sangat disayangkan. "Maka sekali lagi kami ingatkan agar bupati dan jajarannya bisa lebih cermat dalam penganggaran," ujarnya.

Satu hal tak kalah penting, lanjut Hermin, terkait piutang macet karena tak tertagih. "Apa kendalanya? Karena

piutang harus tetap ditagih, dan perlu upaya serius agar tidak membebani neraca daerah," terang Hermin.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Amanat Demokrasi H Farodhi menuturkan, selain Silpa tinggi didominasi Dinas Kesehatan hingga sebesar Rp 98,283 miliar, fraksi gabungan PAN dan Partai Demokrat itu juga meminta penjelasan bupati mengenai pemberian penyertaan modal BUMD hingga sebesar Rp 32 miliar.

"Ini (Rp 32 miliar) jumlah cukup besar

untuk pengembangan usaha BUMD. Terlebih sejauh ini belum terlihat pengembangan usaha BUMD yang memberikan hasil berbanding lurus dengan deviden yang diperoleh. Utamanya Perusa Aneka Wira Usaha," tuturnya.

Lebih dari itu, selain penanganan banjir rob yang masih saja menjadi 'PR' hingga saat ini seperti disampaikan Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasdem pun memberikan perhatian pada pelaksanaan Pilkades yang diagendakan serentak di 183 desa pada Oktober 2022. Terutama kaitannya biaya operasional, yang sesuai SK bupati selain ditanggung APBDes juga akan mendapatkan bantuan anggaran dari APBD.

Sehubungan itu Bupati dr Hj Eisti'annah pada Rapat Paripurna DPRD Demak 7 Juni 2022 menjelaskan, penyusunan anggaran sudah disesuaikan dengan potensi pendapatan dan belanja daerah sebagaimana kebutuhan dalam melaksanakan visi misi yang telah dibahas bersama DPRD.

"Silpa sebesar Rp 242,258 miliar tersebut sebagian besar merupakan sisa anggaran penanganan covid-19 yang mengalami penurunan signifikan pada akhir tahun sehingga tidak dapat direalisasikan," tutup bupati. *sjj

INISIATIF DARI PEMERINTAH PUSAT

Pembangunan Kawasan Borobudur Minim Pelibatan Masyarakat Sekitar

YOGYA (KR) - Rencana penerapan tarif naik Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 menjadi sorotan dan menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Pengamat pariwisata sekaligus Kepala Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM Dr Muhammad Yusuf mengatakan, perkembangan amenities dan aksesibilitas menuju dan di dalam kawasan Borobudur berjalan sangat cepat. Bahkan, menurutnya, terlalu cepat, sehingga banyak unsur masyarakat yang tidak siap dengan perkembangan yang terlalu cepat tersebut.

Studi yang dilakukan Puspar UGM menunjukkan bahwa ham-

pir semua inisiatif pembangunan di kawasan Borobudur adalah inisiatif Pemerintah Pusat sehingga sangat sedikit atau bahkan 'tanpa' pelibatan masyarakat sekitar, termasuk para penggerak wisata. "Menjadi cukup wajar bila kemudian masyarakat tidak terlalu paham arah pengembangan di kawasan Borobudur, dan bahkan bingung harus melakukan apa," ujarnya, Selasa (7/6).

Dia mengakui angka kunjungan wisatawan domestik ke

Borobudur sangat banyak dan cenderung naik. Bahkan saking banyaknya terlihat melebihi daya dukung khususnya Candi Borobudur. Data memperlihatkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 sebanyak 3.855.285 terdiri dari wisatawan domestik 3.663.054 dan wisatawan mancanegara 192.231. Sementara di tahun 2019 jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 5.016.839 terdiri dari wisatawan domestik 4.774.757 dan wisatawan mancanegara 242.082.

Oleh karena itu, berdasarkan kajian yang telah dilakukan selama ini dan untuk mendukung kon-

servasi maka seharusnya jumlah kunjungan ke candi tidak lebih dari 300 pengunjung perhari. Sedangkan keputusan 1.200 pengunjung perhari adalah untuk kawasan candi bukan untuk menaiki candi.

"Karena banyak studi telah menunjukkan kelebihan pengunjung selama ini telah membuat kerusakan di candi, seperti perusakan di candi yang terus menurun, dan batu candi yang mulai rusak," katanya.

Sebagai pengamat, Yusuf menayangkan jika kebijakan mengenai konservasi dan pariwisata di Candi Borobudur ini se-

ring kali tidak integratif. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakjelasan pemangku kepentingan yang terlibat. Siapa bertanggung jawab terhadap apa tidak ada kejelasan.

Untuk itu, sambungnya, kebijakan tarif masuk candi seharusnya ditentukan berdasarkan kajian yang mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholders yang terkait. Seperti halnya kebijakan pembangunan di sekitar kawasan candi. "Saya melihat penentuan tarif ini juga tanpa melakukan studi yang komprehensif sehingga banyak pihak yang tidak berkenan," pungkasnya.

Polemik melejitnya tarif menaiki Candi Borobudur ditanggapi Pakar bidang Opini Publik dan Partai Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Tulus Warsito MSi. Menurutnya wacana kenaikan tarif tiket Candi Borobudur dan membuat geger masyarakat telah mengabaikan psikologi politik masyarakat.

"Naiknya harga tiket yang fantastis dan membuat geger masyarakat ini kaitannya dengan etika politik kebijakan. Mengingat menjadi sangat problematis, karena tiba-tiba bisa naik drastis hingga Rp 750.000," paparnya. (Dev/Fsy)-d

Tanah Longsor Terjang Ngablak dan Grabag



KR-Dok BPBD Kab Magelang

Kerja bakti membersihkan jalan dari material longsor.

MAGELANG (KR) - Tanah longsor terjadi di wilayah Kecamatan Ngablak dan Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang berlangsung di 10 titik lokasi di dua kecamatan tersebut. Warga ma-

sarakat, Selasa (7/6) bersama beberapa pihak dan Tim BPBD Kabupaten Magelang melakukan penanganan. Selain itu, juga pembersihan lumpur agar jalan tidak licin.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupa-

ten Magelang Edi Wasono SH kepada KR menjelaskan, tanah longsor terjadi Ngablak dan Grabag, Senin (6/6) petang dipicu turunnya hujan yang berlangsung sejak siang hari. Di lokasi ada rumah warga berjarak sekitar 0,5 me-

ter dari titik longsor. Warga memasang terpal agar air hujan tidak langsung ke areal longsor.

BPBD Kabupaten Magelang mencatat ada sebagian bangunan rumah yang ikut terdampak, termasuk barang dan peralatan dapur. "Kami meminta warga di sekitar lokasi longsor meningkatkan kewaspadaan manakala terjadi lagi hujan deras dan berlangsung lama," ujar Edi Wasono.

Di wilayah Kecamatan Ngablak, longsor terjadi di Desa Pagergunung. Di lokasi ini material longsor sempat menutup akses jalan antar kecamatan, yaitu Kecamatan Ngablak dan Kecamatan Grabag. Kemudian, tanah tebing di belakang rumah salah satu warga di wilayah Girirejo juga longsor, bagian dapur dan kamar mandi rumah warga tersebut, runtuh. (Tha)-f

DISBUD DIY GELAR WORKSHOP DONGENG Berharap Dongeng Kembali Membumi

SEKSI Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY bekerja sama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) dan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK) serta komunitas sastra di Yogya, menggelar Workshop Revitalisasi Sastra Lisan (Dongeng), Rabu-Kamis (8-9/6) di Auditorium Museum Sonobudoyo.

Workshop Dongeng untuk guru TK dan PAUD perwakilan kabupaten/kota se-DIY ini menghadirkan narasumber Dr Cahyaningrum Dewojati (dosen Prodi Sastra Indonesia UGM), Broto Wijayanto (seniman, praktisi dongeng), Bagong Soebardjo (praktisi dongeng, kartunis, dalang wayang dongeng). Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka ini juga ditayangkan melalui kanal YouTube Dinas Kebudayaan DIY: *tasteofjogja disbud diy*.

Kepala Seksi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan DIY Setya Amrih Prasaja SS mengatakan, dongeng telah menjadi kebiasaan nenek moyang kita. Melalui dongeng, manusia belajar tentang nilai-nilai moral melalui sebuah cerita. Dengan menggalakkan sastra lisan, khususnya dongeng, di masa sekarang Dinas Kebudayaan DIY berharap bahwa dongeng kembali membumi dan memasyarakat, khususnya di wilayah DIY.

"Targetnya, anak-anak sekarang, salah



KR-Istimewa
Setya Amrih Prasaja SS.

satunya melalui guru-guru PAUD dan TK, bisa kembali belajar tentang nilai kehidupan lewat sebuah cerita yang menarik," kata Amrih.

Dikatakan, sastra lisan di tengah era digital memiliki tantangan tersendiri. "Semakin maraknya digitalisasi, sastra lisan hendaknya mampu bertahan di tengah arus globalisasi. Media bisa menjadi salah satu wahana mengenalkan kembali sastra lisan, khususnya dongeng, di tengah masyarakat," kata Amrih pula.

Terkait upaya revitalisasi sastra lisan, khususnya dongeng, Dinas Kebudayaan DIY juga bertujuan agar sastra lisan di DIY tetap terjaga kelestariannya, dan bisa digunakan sebagai media edukasi bagi generasi muda DIY.

Selain itu, peserta mendapatkan pelatihan dongeng untuk dipraktikkan pada peserta didiknya.

"Untuk memperkaya khazanah dongeng, Dinas Kebudayaan DIY juga mengadakan seleksi penulisan naskah dongeng. Naskah dongeng terbaik akan dibukukan. Harapannya dengan adanya buku dongeng bisa menambah koleksi dan khazanah penceritaan," katanya.

Sastra lisan sebagai salah satu bentuk budaya khas di masyarakat, memang memerlukan perhatian untuk bertahan hidup. Salah satunya dengan pewarisan kepada generasi muda.

Sastra lisan ini diwariskan sebagai bentuk kepedulian untuk mewariskan sikap hidup, nilai yang baik, norma-norma sosial, dan hasil yang bermanfaat bagi generasi muda selanjutnya. Sastra lisan sebagai sebuah kekayaan tidak akan punah ditelan zaman. Revitalisasi dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan, menghidupkan atau menggiatkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang berdaya.

Revitalisasi sastra lisan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY juga bertujuan agar sastra lisan di DIY tetap terjaga kelestariannya, dan bisa digunakan sebagai media edukasi bagi generasi muda DIY.

Amrih berharap, melalui guru, dongeng kembali dikenalkan kepada anak-anak TK dan PAUD. Lebih jauh, Dinas Kebudayaan DIY berharap hal ini bisa menjadi pemantik bagi kelompok lain untuk lebih memasyarakatkan dongeng. (Ria)

KETUA DEWAN PENGARAH BPIP

Presiden Lantik Kembali Megawati

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara, Selasa (7/6). Pelantikan ini adalah periode kedua Megawati menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Sebelumnya, ia dilantik untuk menjabat posisi tersebut pada 2018.

Megawati juga menjabat di tiga lembaga sekaligus. Selain di BPIP, ia juga mendapatkan jabatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Duta Pancasila Paskibraka. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No 56/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditetapkan pada 6 Juni 2022.

Adapun Dewan Pengarah BPIP yang dilantik selain Megawati Soekarnoputri sebagai ketua, juga Try Sutrisno sebagai wakil ketua, Wisnu Bawa Tenaya sebagai sekretaris. Selain itu, ada nama Said Aqil Siradj sebagai anggota, Sudhamek Agoeng Waspo Soenjoto, Andreas Anangguru Yewangoe, Rikard Bagun dan Muhammad Amin Abdullah.

Selain melantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Presiden Jokowi juga melantik dan mengambil sumpah Yudian Wahyudi dan Karjono sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPIP. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No 56/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditetapkan pada 6 Juni 2022. Hadir mendampingi Presiden dalam pelantikan ini, Wapres Ma'ruf Amin dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Sim)-f

STATUS PPKM LEVEL 1

Wisata DIY Buka 100 Persen

YOGYA (KR) - Seiring melandainya kasus harian Covid-19 di DIY, Pemerintah Pusat menurunkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) DIY dari Level 2 menjadi Level 1. Dengan adanya penurunan level PPKM tersebut, sejumlah aktivitas kegiatan masyarakat termasuk kepariwisataan dilonggarkan. Bahkan event wisata boleh full alias berkapasitas hingga 100 persen, begitu pula kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak lagi menggunakan rekomendasi Satgas Covid-19. "Pemerintah Pusat sudah memutuskan untuk memberlakukan PPKM Level 1 di DIY. Dengan kebijakan tersebut, aktivitas pariwisata sudah bisa dilakukan 100 persen. Mulai dari sport tourism hingga event musik sudah bisa digelar dengan kapasitas 100 persen. Kendati demikian saya minta masyarakat tetap selalu mentaati ketentuan yang ada," kata Kepala Dinas Pariwisata DIY Singih Raharjo di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (7/6).

Singih mengatakan, setelah status PPKM DIY menjadi Level 1, sektor pendukung destinasi wisata seperti hotel dan restoran juga sudah boleh 100 persen. Hal ini tentu menjadi kabar baik terkait keberadaan kafe maupun resto yang berada di kawasan wisata. Kendati demikian pengelola destinasi maupun pengusaha wisata tetap selalu mengedepankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan serta penekangan proses yang lain, sehingga wisatawan maupun pengunjung merasa nyaman.

"Kami sudah bertemu dengan pekerja event musik bahwa terkait perizinan tidak perlu lagi menggunakan rekomendasi dari Satgas Covid-19. Karena itu perizinan kegiatan cukup dengan izin keramaian dari Kepolisian," papara Singih. (Ria)-d